

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca berakhirnya Perang Dunia II hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia sangat fluktuatif. Tidak ada perkembangan berarti hingga Barack Obama, dibawah pemerintahannya, memutuskan untuk *reset* atau mengatur kembali hubungan AS dengan Rusia menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut disampaikan Obama dalam pidatonya pada pemilu tahun 2008 :

“... reset relations with Russia, move toward a world free of nuclear weapons, avoid "stupid wars" while winning the "right war," combat climate change, and do all of this with a post-partisan style of leadership that brought Americans themselves together in the process.”¹

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa salah satu aspek prioritas dari pemerintahan Obama adalah memperbaharui kembali hubungan AS dengan Rusia. Namun optimisme AS tidak serta merta membuat hubungannya semakin baik. Hadirnya kebijakan-kebijakan yang kontradiktif membuat keduanya semakin canggung.

Saling respon kebijakan antara AS dan Rusia tidak terlepas dari sinisme masa lampau. Dalam sejarah dunia, mispersepsi sebuah negara mengenai tindakan negara lain justru seringkali menyebabkan konflik, begitupula dalam konteks AS dan Rusia. Perselisihan semata disebabkan oleh persepsi masing-masing negara yang telah terkonstruksi untuk melihat satu sama lain sebagai

¹ Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, *et. al.*, *Bending History: Barack Obama's Foreign Policy*, <http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/05/obama-carpenter-national-security-legacy-ohanlon#endref1>, diakses pada 20 April 2016.

ancaman. Pada tahun 2013, kedua negara banyak terlibat dalam perselisihan politik. Berawal dari jaminan suaka politik kontroversial yang diberikan Rusia untuk Edward Snowden pada Agustus 2013, hingga akhirnya reaksi AS dengan membatalkan agenda pertemuan bilateral AS – Rusia di Moskow, hingga penurunan paksa pesawat Kepresidenan Bolivia.

Edward Snowden sendiri merupakan seorang *whistleblower*² yang berstatus sebagai pegawai kontraktor aktif di NSA (*National Security of America*). Pada 5 Juni 2013, media nasional Inggris The Guardian menerbitkan sebuah artikel *online* yang berisi pengakuannya terkait program penyadapan rahasia NSA. Hal tersebut mulai merusak citra baik AS di mata negara-negara dunia, khususnya terkait dengan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi.³

NSA merupakan komunitas intelijen yang berada dibawah Departemen Keamanan Amerika Serikat.⁴ Fungsinya memonitor komunikasi AS dengan negara-negara sekutu dan negara-negara musuh.⁵ Menyimpang dari fungsi yang seharusnya, NSA melakukan penyadapan massal terhadap warga AS dan

² Seorang whistleblower (whistle-blower atau whistle blower) adalah seseorang yang mengekspos berbagai macam informasi atau aktivitas yang dianggap ilegal, tidak etik, atau tidak benar antar organisasi yang bersifat privat atau publik. Pembocoran informasi dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam sifat : penyalahan atas kebijakan/aturan perusahaan, hukum, regulasi, atau ancaman terhadap kepentingan umum/keamanan nasional, sebagaimana penipuan dan korupsi. Mereka yang menjadi *whistleblower* dapat memilih untuk membawa informasi tersebut ke permukaan baik internal atau eksternal. Secara internal, seorang whistleblower dapat membawa dakwaannya agar mendapat perhatian dari orang-orang dalam organisasi yang didakwa. Secara eksternal, seorang whistleblower dapat membawa informasi tersebut dengan menghubungi pihak ketiga diluar organisasi. *Whistleblower* bisa menggapai dan bekerjasama dengan media, pemerintahan, penegak hukum, atau mereka yang prihatin dengan isu yang diangkat. (sumber : <https://www.whistleblower.org/what-whistleblower>).

³ Sinopsis Buku *The Snowden Files* oleh Luke Harding, 2015, PT.Bisnis Indonesia Gagas Kreasi Tama:Jakarta.

⁴ Dr.Bambang Cipto, 2003, *Politik & Pemerintahan Amerika*,Lingkaran:Yogyakarta, Hal.208.

⁵ *Ibid*.

masyarakat dunia (termasuk presiden dan jajarannya) atas dasar melindungi keamanan nasional dan kebijakan preventif terhadap aksi terorisme.

Aksi penyadapan NSA telah berlangsung lama dan melibatkan beberapa perusahaan besar seperti seperti Facebook, Yahoo, Twitter, Google dan Microsoft untuk melakukan pelacakan komunikasi *online* melalui program bernama *Prism*⁶. NSA juga bekerjasama dengan perusahaan kartu seluler terbesar di AS yaitu Verizon untuk mendapatkan setiap bentuk riwayat komunikasi pelanggan, baik dari dalam maupun dari luar AS.⁷ Tindakan tersebut kemudian dikecam oleh masyarakat AS melalui aksi-aksi protes serta para pemerhati Hak Asasi Manusia diseluruh dunia khususnya negara-negara yang menjadi korban penyadapan seperti China, Indonesia dan Jepang.

Pada 31 Juli 2013 Edward Snowden mendapat jaminan suaka untuk menetap di Rusia selama satu tahun.⁸ Pasca pencabutan hak kewarganegaraan dan pembatalan *passport* bagi Snowden, AS resmi menetapkan Snowden sebagai buronan politik dan mendesak Rusia untuk mencabut hak suaka Snowden untuk dikembalikan ke teritori AS. Namun Menteri Luar Negeri Rusia, Konstatin Dolgov, menekankan bahwa Moskow tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan Snowden.⁹

⁶ Disampaikan oleh Edward Snowden dalam film dokumenter 'Citizenfour' karya Laura Poitras yang di-*release* pada Oktober 2014.

⁷ Harding, *Op.Cit.*, Hal.146.

⁸ Steven Lee Myers & Andrew.L.Kramer, 2013, *Defiant Russia Grants Snowden Year's Assylum*, The New York Times, http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/europe/edward-snowden-russia.html?_r=0, diakses 1 Mei 2016.

⁹ Andrew.C.Kuchins, 2013, *The Ironies of Edward Snowden and U.S.-Russia Relations*, <http://csis.org/publication/ironies-edward-snowden-and-us-russia-relations>, diakses 20 April 2016.

Respon AS terhadap kebijakan suaka politik Rusia untuk Snowden menarik untuk diteliti mengingat sebelumnya AS sendiri telah mencabut status kewarganegaraan Snowden. AS juga memvonis Snowden menggunakan hukum *Espionage Act 1917*¹⁰, dasar hukum spionase yang tidak relevan dalam kasus Snowden karena hanya berlaku dalam konteks spionase perang.¹¹ Disamping itu, AS dan Rusia tidak pernah terikat dalam sebuah perjanjian ekstradisi. Oleh karena itu, status Snowden sebagai buronan negara tidak melahirkan kewajiban bagi Rusia untuk menyerahkan Snowden ke negara asalnya.

Mengacu pada hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat “Respon AS Terhadap Pemberian Suaka Politik Untuk Edward Snowden Oleh Rusia” sebagai judul skripsi guna menganalisa respon-respon akibat dari diberikannya suaka politik terhadap Edward Snowden, *whistleblower National Security of America* (NSA), oleh Rusia pada tahun 2013.

¹⁰ Pada April 1917 Amerika Serikat mendeklarasikan perang dengan Jerman yang mendorong lahirnya hukum spionase atau *The Espionage Act* pada Juni 1917 yang mengatur tentang tindak spionase selama masa perang terjadi. *Espionage Act 1917* terdiri dari 9 pasal dan 7 ayat. Isi pokok *Espionage Act 1917* adalah setiap pihak yang mendapatkan dan menyebarluaskan informasi (mengenai stasiun koalisi, pesawat terbang, peta, gudang senjata, dan data-data yang berkaitan dengan kebutuhan perang) dengan tujuan membahayakan pertahanan AS atau memperoleh keuntungan dari negara asing, maka pada masa perang akan dihukum mati atau dipenjara tidak lebih dari tiga puluh tahun. Naskah asli dan lengkap dari *Espionage Act 1917* dapat diakses di : http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtid=3&psid=3904.

¹¹ Glenn Greenwald, 2013, *On The Espionage Act Charges Against Edward Snowden*, The Guardian, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/22/snowden-espionage-charges>, diakses 15 April 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas dan beberapa pertimbangan data, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Respon AS Atas Kebijakan Pemberian Suaka Politik Untuk Edward Snowden oleh Rusia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui bagaimana respon atas pemberian suaka politik terhadap Edward Snowden Oleh Rusia, (2) Mengetahui mispersepsi yang dilakukan AS dalam respon-responnya terkait kasus Snowden dan (3) Memahami dinamika hubungan AS dan Rusia selama kasus Snowden mulai mencuat di publik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan riset secara keilmuan, baik pada aspek teoritis maupun terhadap pembangunan wacana. Sehingga dapat memberikan informasi terkait mispersepsi dalam kebijakan negara, dinamika hubungan AS-Rusia di era Barack Obama serta perspektif-perspektif dalam teori kebijakan luar negeri ilmu HI.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan keilmuan dan pengembangan pengetahuan terhadap diri sendiri, lembaga dan institusi-institusi keilmuan untuk mendukung proses belajar mengajar, khususnya dalam memahami gambaran respon suatu pemerintahan atas suatu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara lain.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama sebuah skripsi berjudul “Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Kebijakan Pertahanan Indonesia” yang ditulis oleh Sempati Rigo pada tahun 2017.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitiannya, Sempati Rigo mencoba menjelaskan eskalasi konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang memunculkan persepsi ancaman bagi Indonesia sehingga menyebabkan perubahan kebijakan pertahanan Indonesia, seperti pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna, Pengerahan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) serta kebijakan pembangunan kekuatan minimum pertahanan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada kajian militer dan pertahanan sedangkan penulis menekankan pada persepsi pembuat kebijakan, sedangkan persamaannya adalah berupaya menganalisa berdasarkan konsepsi persepsi ancaman dari Robert Jervis.

¹² Sempati Rigo, 2017, *Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Kebijakan Pertahanan Indonesia*, Skripsi, Padang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Andalas.

Penelitian kedua adalah sebuah jurnal yang berjudul “*China, Internet Freedom and U.S Policy*” yang ditulis oleh Thomas Lum, Patricia Moloney Figliola, Matthew .C. Weed pada tahun 2012.¹³ Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitiannya, para penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana respon AS terhadap kebijakan penyadapan aktivitas *cyber* pemerintah China terhadap warganya. Sebagai negara yang sangat menjunjung HAM, AS menunjukkan protes dan kritiknya melalui beberapa perubahan kebijakan luar negeri terhadap China, salah satunya adalah perumusan *Global Online Freedom Act (H.R. 3605)*. Komitmen AS adalah mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk menarik setiap teknologi penyadapan yang disediakan untuk negara-negara yang membatasi aktivitas *cyber* serta menghalangi penjualan alat teknologi yang kemungkinan akan digunakan untuk aktivitas sensorship dan penyadapan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi berupaya menganalisa respon AS terhadap isu penyadapan dan pelanggaran HAM warga negara. Dengan demikian, kita dapat melihat persamaan dan perbedaan respon AS terhadap isu yang sama terhadap negara yang berbeda.

Penelitian ketiga adalah sebuah jurnal berjudul “Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Edward Snowden Oleh Rusia” yang ditulis oleh Devi

¹³ Thomas Lum, Patricia Moloney Figliola, Matthew.C.Weed, 2012, *China, Internet Freedom and U.S Policy*. Congressional Research Service, <https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf>, diakses 7 Agustus 2016.

Asprilla dan Ayub Torry Satiyo Kusumo pada tahun 2016.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang normatif dengan sifat penelitian preskriptif, sehingga menggunakan prinsip-prinsip suaka politik dan hukum internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum yaitu perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknis analisa bahan hukum dengan silogisme deduktif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Edward Snowden adalah seorang pelaku kejahatan politik yang melarikan diri dari tuntutan Amerika (meskipun menurut hukum nasional Amerika ia hanya tergolong pelaku kejahatan biasa/non-politik). Pemberian suaka terhadap Edward Snowden dikatakan legal karena ia memenuhi syarat dan kriteria seseorang yang bisa menerima suaka berdasarkan Pasal 14 DUHAM. Tindakan Rusia juga sudah tepat meskipun suaka ‘sementara’ hanya diberikan untuk mereka yang dirasa memiliki potensi untuk membahayakan keamanan nasional pihak pemberi suaka. Persamaan penelitian Devi Asprilla dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama mengangkat Edward Snowden sebagai aktor pemicu dari fenomena yang ingin dianalisa dan berupaya menganalisa tindakan Rusia sebagai pihak yang memberikan suaka politik. Perbedaannya adalah Devi Asprilla lebih menekankan pada pendekatan konsep hukum suaka internasional, penelitian bersifat preskriptif dan memaparkan pembuktian hukum bahwa Edward Snowden layak menerima suaka politik dari Rusia,

¹⁴ Devi Asprilla, Ayub Torry SK, 2016, *Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Edward Snowden Oleh Rusia*, Belli Ac Pacis, Vol.2, Nomor 1, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JmCokmWnfrYJ:jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/belliacpacis/article/download/1140/1036+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses 7 Agustus 2016.

sedangkan penelitian ini berfokus pada respon Amerika pasca pemberian suaka tersebut oleh Rusia.

Penelitian keempat adalah sebuah jurnal yang berjudul “*Tindakan Rusia Memberikan Suaka Politik Terhadap Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Tahun 2014*” yang tulis oleh Tri Agung Febriono dan dipublis pada tahun 2015.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Neorealism, Konsep *Securitization*, Konsep Hukum Internasional mengenai teori legalisasi. Penelitian ini mencoba menjelaskan rasionalitas Rusia dalam memberikan suaka politiknya dengan mengabaikan fakta bahwa Yanukovych, menurut pandangan hukum internasional, sudah tidak bisa mendapatkan suaka dan perlindungan politik dari Rusia serta sedang dalam proses menunggu hukuman dari Mahkamah Internasional dan lembaga pengadilan Ukraina. Persamaan penelitian Tri Agung Febriono dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tindakan pemberian suaka politik oleh Rusia untuk tokoh yang secara politik cukup ‘janggal’ untuk diberikan hak hidup di teritorinya karena tidak ada data valid yang mampu menjelaskan keuntungan yang didapatkan Rusia dari pemeberian suaka tersebut. Perbedaannya terdapat pada fokus/unit analisa serta teori yang konsep yang digunakan untuk menganalisa kasus.

¹⁵ Tri Agung Febriono, 2015, *Tindakan Rusia Memberikan Suaka Politik Kepada Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Tahun 2014*, Jom FISIP, Vol.2, Nomor 2, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349395&val=6444&title=TINDAKAN%20RUSIA%20MEMBERIKAN%20SUAKA%20POLITIK%20KEPADA%20MANTAN%20PRESIDEN%20UKRAINA%20VIKTOR%20YANUKOVYCH%20TAHUN%202014>, diakses 29 Mei 2016.

Penelitian kelima adalah sebuah paper berjudul “*Under the Guise of National Secirity – Surveillance, Snowden and the challenges to democracy*” yang ditulis pada tahun 2013.¹⁶ Paper tersebut menganalisa perbedaan dan perubahan perilaku Amerika sebelum dan selama proses pembocoran rahasia NSA yang dilakukan oleh Edward Snowden. Penelitian tersebut menggunakan Teori Neorealis, Teori *World Risk Society* dari Ulrich Beck dan Konsep *Fear Culture*. Persamaan dari paper ini dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisa perilaku pemerintah AS terkait tindakan Edward Snowden serta seberapa jauh indikasi perubahan perilaku tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah paper ini berfokus kepada kebijakan yang dikeluarkan Amerika terkait tindakan Edward Snowden, sedangkan penulis berupaya menganalisa alasan dibalik tindakan Amerika sebagai respon terhadap kebijakan Rusia yang memberikan suaka politik.

1.4.1 Tabel Posisi Penelitian

No	Judul & Nama Peniliti	Jenis Penelitian & Alat Analisa	Hasil
1	“Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Kebijakan Pertahanan Indonesia”. Oleh Rigo Sempati pada tahun 2017.	Penelitian Deskriptif & Konsep Kebijakan Pertahanan, Konsep Persepsi Ancaman	Eskalasi konflik LCS memunculkan persepsi ancaman bagi Indonesia sehingga menyebabkan perubahan kebijakan pertahanan Indonesia. Kebijakan- kebijakan pertahanan Indonesia mulai difokuskan pada

¹⁶ Carl Windahl Bollingtoft, Stinne Fris Vognaes, Caroline Elmquist-Calusen, Roxanne Lucienne, et.al., 2013, *Under the Guise of National Secirity – Surveillance, Snowden and the challenges to democracy*, <http://diggy.ruc.dk:8080/handle/1800/3603/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Nielsen%2C+Peter>, diakses 29 Mei 2016.

			perkembangan isu konflik LCS, seperti pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna, Pengerahan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) serta kebijakan pembangunan kekuatan minimum pertahanan Indonesia.
2	“ <i>China, Internet Freedom and U.S Policy</i> ”. Oleh Thomas Lum, Patricia Moloney Figliola, Matthew .C. Weed pada tahun 2012.	Penelitian kualitatif & Konsep <i>Human Right</i>	AS mengeluarkan kebijakan luar negeri resmi sebagai bentuk kritik dan protes atas kebijakan penyadapan dan sensorsip pemerintah Cina : menghentikan aliansi perusahaan teknologi AS dengan negara-negara yang membatasi aktivitas <i>cyber</i> . AS menetapkan Internet dan Hak Asasi Manusia sebagai pilar utama kebijakan luar negeri AS terhadap Cina.
3	“Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Edward Snowden Oleh Rusia”. Oleh Devi Asprilla tahun 2014.	Penelitian Preskriptif & Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual.	Membantah ketepatan tindakan AS yang mengecam pemberian suaka politik oleh Rusia terhadap Edward Snowden. Pemberian suaka terhadap Edward Snowden dikatakan legal karena ia memenuhi syarat dan kriteria seseorang yang bisa menerima suaka berdasarkan Pasal 14 DUHAM.
4	“Tindakan Rusia Memberikan Suaka Politik Terhadap Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Tahun 2014”. Oleh Tri	Penelitian Kualitatif & Teori Neorealis, Konsep Sekuritisasi, Konsep Hukum Internasional	Tindakan Rusia memiliki rasionalitas yang kuat untuk dibantahkan begitu saja menggunakan hukum internasional (mengingat legalitas hukum internasional yang

	Agung Febriono pada tahun 2015.		mnegatur suaka itu sendiri masih lemah dari segi obligasi, presisi, dan delegasi). Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap seorang pelanggar HAM yang terjerat kasus hukum yang kompleks juga merupakan hak dan wewenang negara itu sendiri, sehingga tidak bisa di ganggu gugat.
5	“ <i>Under the Guise of National Secirity – Surveillance, Snowden and the challenges to democracy</i> ” . Oleh Carl Windahl Bollingtoft, Stinne Fris Vognaes, Caroline Elmquist-Calusen, Roxanne Lucienne Eva Genest, Peren Helvaci dan Niels Daniel Arndt Aguilar pada tahun 2013.	Penelitian Kualitatif & Teori <i>World Risk Society</i> , Teori <i>Neorealism</i> dan Konsep <i>Fear Culture</i> .	Tindakan AS untuk segera menetapkan Edward Snowden sebagai buronan dan pembocor rahasia negara adalah upaya untuk melegitimasi program NSA dan meminimalisir kemungkinan bocornya informasi yang lain. Dengan begitu, keamanan nasional muncul sebagai alibi. Tindak penyadapan dianggap penting untuk melindungi pemerintah AS karena hilangnya kekuasaan relatif akan membahayakan posisi AS dalam sistem internasional.
6	“Respon AS Terhadap Pemberian Suaka Politik Untuk Edward Snowden Oleh Rusia”. Oleh Rufanis Khalishah Putri pada tahun 2016.	Penelitian Kualitatif & Konsep Aksi-Reaksi, Konsep Mispersepsi oleh Robert Jervis	Respon AS dilatarbelakangi oleh reaksinya terhadap kebijakan suaka politik Rusia yang dianggap ofensif. Respon tersebut berupa pemberhentian pesawat Kepresidenan Bolivia, intervensi kebijakan Uni Eropa dan pembatalan pertemuan bilateral keduanya. Namun AS membuat mispersepsi terkait kekuatan Rusia dan Snowden sebagai

			ancamannya sehingga harus menanggung konsekuensi runtuhnya komitmen <i>reset</i> dan gagal mencapai kepentingan nasionalnya.
--	--	--	--

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Aksi – Reaksi

Robert Jervis dalam konsep ini menjelaskan bahwa dalam interaksi kedua negara, kebijakan yang diambil oleh suatu negara dapat menjadi reaksi atas kebijakan negara lain. Hal ini dilakukan karena masing-masing negara menginginkan adanya perimbangan posisi dengan pihak lain. Pembuat kebijakan meyakini bahwa apa yang dilihatnya dari negara lain sebagai bentuk tindakan ofensif, sementara apa yang diupayakannya sendiri adalah upaya defensif.

Dalam dinamika aksi-reaksi, reaksi negara A sangat bergantung terhadap persepsinya atas aksi negara B, apakah motifnya bernilai inisiatif atau ancaman.¹⁷ Hal sama kemudian menjadi pertimbangan negara B untuk melakukan reaksi berikutnya sehingga siklus aksi-reaksi kedua negara terus berlanjut.

1.5.2 Konsep Mispersepsi

Dalam menentukan tindakannya, persepsi sebuah negara dibentuk oleh *images*, *belief* dan *intentions*.¹⁸ *Image* adalah hal yang tergambar dari perilaku

¹⁷ Robert Jervis, 1976, *Perception and Misperception in International Politics*, New Jersey: Princeton University Press, Hal.112.

¹⁸ Jervis, *Op.Cit.*, Hal.28.

suatu negara, *belief* adalah sesuatu yang dipercayai atas tindakan suatu negara, sedangkan *intentions* adalah prediksi atas apa yang akan dilakukan oleh suatu negara.¹⁹ Meskipun demikian, persepsi suatu negara sangat rentan mengalami kekeliruan.

Persepsi negara berdasarkan faktor-faktor diatas, cenderung bias sehingga rawan terjadinya mispersepsi. Robert Jervis, dalam konsep ini berupaya menjelaskan tentang bentuk-bentuk persepsi suatu negara yang mengalami kekeliruan, baik dari aspek kalkulasi kekuatan yang dimilikinya maupun tindakan yang dilakukan oleh negara lain.

Bias yang menjadi penyebab mispersepsi terbagi kedalam *motivated bias* (sengaja dilakukan oleh sebuah negara untuk menjustifikasi setiap tindakannya) dan *unmotivated bias* (tidak sengaja dilakukan oleh suatu negara, situasi yang sulit membuat persepsinya terdistorsi sehingga tidak menyadari mispersepsi yang dibuatnya).

Terdapat empat bentuk mispersepsi yang umum terjadi dalam politik internasional, yaitu²⁰ : (1) *Perception of Centralization* (menilai tindakan pihak lain telah terencana dan menghubungkannya dengan tindakan-tindakan lain yang tidak berhubungan sehingga membentuk *pattern*), (2) *Overestimating One's Importance as Influence or Target* (melebih-lebihkan motif dari tindakan yang dilakukan oleh pihak lain), (3) *The Influence of*

¹⁹ *Persepsi Jepang Terhadap Agresivitas Militer Tiongkok*, 2015, Skripsi, Padang:Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Andalas.

²⁰ Jervis, *Op.Cit.*, Hal. 343.

Desires and Fears on Perceptions (menilai pihak lain sebagai lawan karena adanya dorongan dan rasa takut), dan (4) *Cognitive Dissonance* (upaya menjustifikasi tindakan guna meminimalisir konflik internal).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, respon-respon AS adalah bentuk aksi-reaksi kebijakan antara AS dan Rusia. AS bereaksi terhadap kebijakan Rusia sebagai upaya menyamakan posisi karena kebijakan suaka politik untuk Snowden dianggap mengancam AS. Sementara persepsi AS terkait respon-responnya adalah keyakinan bahwa data-data rahasia NSA ada bersama Snowden di Rusia. AS meyakini bahwa kebijakan tersebut adalah strategi Rusia untuk memanfaatkan keahlian Snowden sebagai pakar IT, sehingga dengan kampuan siber dan bantuan dari aliansinya (Cina, Iran dan Korea Utara) data-data NSA dapat diolah untuk menguntungkan Rusia dan aliansinya sehingga efeknya melemahkan keamanan nasional AS.

Bentuk mispersepsi AS tergolong dalam *Overestimating One's Importance as Influence or Target* dan *The Influence of Desires and Fears on Perceptions*. Ketika tindakan pihak lain tidak menguntungkan pihaknya, maka AS meyakini bahwa pihak-pihak tersebut sedang berupaya mengancam dan membahayakannya. Bentuk mispersepsi AS tersebut dapat dijelaskan berdasarkan : (1) mispersepsi AS terkait intensi pihak lain, (2) mispersepsi AS terkait kepentingan pihak lain, (3) mispersepsi terkait ancaman. Oleh karena itu, guna menganalisa bagaimana Respon AS Atas Kebijakan Suaka Politik Untuk Edward Snowden Oleh Rusia, penulis akan menggunakan Konsep Aksi-Reaksi dan Konsep Mispersepsi oleh Robert Jervis.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam penelitian ini ialah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat yang terkait dengan permasalahan yang peneliti bahas. Sesuai dengan jenis penelitian, maka data-data yang digunakan adalah data-data kualitatif.²¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka (*Library Research*). Data dikumpulkan melalui sumber-sumber yang valid seperti buku, jurnal, skripsi, esai, *paper*, *working paper*, koran, maupun artikel-artikel dari media pemberitaan resmi di internet. Sumber pencarian data yang relevan lainnya juga dipertimbangkan seperti situs-situs kenegaraan dan berita nasional resmi baik lingkup lokal maupun internasional.

²¹ Sulistyio Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Hal.111.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi dua yaitu ruang lingkup batasan waktu dan batasan materi. Hal ini berguna untuk membatasi pembahasan agar tidak berkembang keluar dari kerangka dasar penelitian.

a. Batasan Waktu

Merujuk pada tujuan kepenulisan yang deskripsikan respon dan persepsi AS terkait aksi Snowden, maka penulis menarik batasan waktu penelitian yaitu tahun 2013-2015 mengingat penerbitan pertama data NSA oleh The Guardian yaitu tahun 2013 dan mulai secara masif diterbitkan oleh berbagai media internasional lainnya hingga tahun 2015.

b. Batasan Materi

Adapun ruang lingkup batasan materi pada penelitian ini adalah berkisar pada pembahasan seputar persepsi dan kebijakan AS dalam responnya atas tindakan Rusia dan pihak-pihak lainnya terkait kasus Edward Snowden, posisi diplomatik dan *statement* publik sebagai instrumen untuk menentukan bagaimana respon terhadap kebijakan pemberian suaka politik.

1.7 Argumentasi Dasar

Hadirnya respon-respon yang membahayakan hubungan kedua negara tidak terlepas dari adanya kekeliruan AS dalam mengkalkulasi kekuatan : siapa dan apa yang benar-benar mengancamnya. Kekeliruan AS tidak terlepas dari rasa khawatir akan data-data NSA yang berada bersama Snowden di teritori Rusia, dengan kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain selain Rusia. Oleh karena itu, reaksi AS terhadap Rusia adalah bentuk mispersepsi AS mengenai kelebihan pihak-pihak yang dianggap AS mengancam, yaitu Edward Snowden dan Rusia.

Respon AS terdiri atas : (1) Pembatalan pertemuan bilateral AS dan Rusia di Moskow, (2) Pemberhentian paksa pesawat Kepresidenan Bolivia, dan (3) Intervensi AS terhadap kebijakan Uni Eropa. Dikarenakan adanya mispersepsi AS dalam melakukan respon-respon tersebut maka kepentingan nasionalnya saat itu gagal tercapai yaitu mengembalikan Snowden ke teritori AS.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1	
	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat
	1.3.1 Tujuan Penelitian

	1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.4.1 Tabel Posisi Penelitian 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Aksi-Reaksi 1.5.2 Konsep Mispersepsi 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumentasi Dasar 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	
	Pemberian Suaka Politik Untuk Edward Snowden 2.1 Posisi Isu <i>Surveillance</i> Bagi Amerika Serikat 2.2 Kekhawatiran AS Terhadap Edward Snowden Terkait Keamanan Nasionalnya 2.2.1 Perkiraan Data Rahasia NSA yang Belum Dipublis 2.2.2 Data Rahasia NSA yang Telah Dipublis 2.3 Kronologi Pengakuan Edward Snowden 2.4 Kebijakan Pemberian Suaka Politik Oleh Rusia 2.4.1 Alasan Rusia Memberikan Jaminan Suaka Politik Untuk Edward Snowden
BAB III	
	Respon dan Persepsi AS Terhadap Snowden dan Rusia 3.1 Respon AS Terhadap Pemberian Suaka Untuk Edward Snowden 3.1.1 Pemberhentian Pesawat Kepresidenan Bolivia 3.1.2 Intervensi AS Terhadap Kebijakan Uni Eropa 3.1.3 Pembatalan Pertemuan Bilateral AS dan Rusia di Moskow 3.2 Pertimbangan Persepsi AS : Snowden dan Rusia Sebagai Ancaman

	<p>3.2.1 Kapasitas Snowden di Rusia</p> <p>3.3 Analisa Mispersepsi Kebijakan AS Terhadap Kebijakan Suaka Politik Edward Snowden Oleh Rusia</p> <p>3.3.1 Mispersepsi AS Terkait Pembatalan Pertemuan Bilateral AS dan Rusia</p> <p>3.3.2 Mispersepsi AS Terkait Pemberhentian Pesawat Kepresidenan Bolivia</p> <p>3.3.3 Mispersepsi AS Terkait Intervensi Kebijakan Uni Eropa</p>
BAB IV	
	Penutup
	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>
	Daftar Pustaka